

ABSTRAK

Pasal 218 KUHP Baru menimbulkan pertentangan konseptual yang mendalam dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal ini dikritik sebagai bentuk regulasi anti-demokrasi karena membatasi hak rakyat untuk mengkritik atau mengekspresikan pendapatnya mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru, yang mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, berpotensi mengekang kebebasan berbicara, menulis, dan menyatakan sikap. Interpretasi yang luas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai kritik atau penghinaan berisiko bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat. Maka penting untuk melakukan penelitian dengan tujuan membahas mengenai urgensi delik penghinaan ini dengan tinjauan yang relevan yakni hak kebebasan berpendapat. Sehingga dalam penelitian ini penulis merumuskan bagaimana urgensi delik penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang no 1 tahun 2023 ditinjau dari perspektif hak kebebasan berpendapat?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digabungkan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil analisis menunjukkan urgensi membentuk Pasal 218 dirancang untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk merendahkan martabat pejabat negara secara sembarangan. Oleh karena itu, meskipun kritik terhadap Presiden adalah hak yang dilindungi, penghinaan yang jelas melanggar martabat dan kehormatan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Pengaturan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara melindungi pejabat negara dari penghinaan yang merugikan dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dihormati dalam kerangka hukum yang adil.

Kata kunci: Delik Penghinaan-Hak Kebebasan Berpendapat-Presiden

ABSTRACT

Article 218 of the New Criminal Code (KUHP) raises deep conceptual conflicts with the principles of popular sovereignty and democracy. This article has been criticized as an anti-democratic regulation because it limits the people's right to criticize or express their opinions about the President and Vice President. Article 218(1) of the New Criminal Code, which prescribes penalties for those who attack the honor or dignity of the President and Vice President, has the potential to curtail freedom of speech, writing, and expression. A broad interpretation of what can be considered criticism or insult risks conflicting with Article 28E(2) of the 1945 Constitution, which guarantees freedom of expression. Therefore, it is essential to conduct research to discuss the urgency of the offense of defamation from the perspective of freedom of expression. This research aims to address the urgency of the defamation offense against the President in Law No. 1 of 2023 from the perspective of freedom of expression.

The research method used is normative juridical. The approach involves a combination of the statute approach and the conceptual approach. The analysis shows that the urgency of Article 218 is designed to ensure that freedom of expression is not misused to indiscriminately undermine the dignity of state officials. Therefore, while criticism of the President is a protected right, clear insults that violate dignity and honor are unacceptable. This regulation is important to maintain a balance between protecting state officials from harmful defamation and ensuring that freedom of expression is respected within a fair legal framework.

Keywords: *Offense of Insult-Right to Freedom of Opinion-President*